

MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS ASET LOKAL DI DAERAH TERTINGGAL KABUPATEN TRENGGALEK

Didiek Tranggono, Praja Firdaus N**, Andre Yusuf Trisna P****

UPN "Veteran" Jawa Timur

**di2ektranggono@gmail.com, **firdaus.praja@gmail.com,*

****andreyusuf.tp@upnjatim.ac.id*

ABSTRAK

Kabupaten Trenggalek merupakan sebuah wilayah yang berada di bagian selatan Provinsi Jawa Timur. Sebagaimana banyak daerah lainnya, karena posisi geografis yang terletak di selatan, Kabupaten Trenggalek termasuk daerah berkembang yang kemajuannya terkesan lambat. Apalagi di beberapa sudut kabupaten, masih terdapat desa-desa tertinggal. Desa Tegaren dulunya adalah desa dengan status IDT (Inpres Desa Tertinggal), yang kemudian sering mendapatkan bantuan dari pemerintah. Sedangkan Desa Winong merupakan tetangga desa Tegaren, juga termasuk dalam desa tertinggal. Sementara itu Desa Tasikmadu di Kecamatan Watulimo adalah prototipe desa pesisir yang masih tergolong tertinggal walaupun terletak di kawasan wisata pesisir. Penelitian yang telah kami lakukan merupakan pengembangan model ABCD (Asset Based Community Development) oleh Christopher Dureau yang fokus pada pemanfaatan aset. Untuk menentukan pengembangan metode ABCD, penelitian ini menggunakan pendekatan campuran (mix method) dengan instrumen wawancara, observasi, dan penyebaran kuisioner. Penelitian ini akan berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di desa tertinggal Kabupaten Trenggalek dengan berfokus pada aset desa. Masalah yang kemudian timbul adalah baik Desa Tasikmadu, Winong, maupun Tegaren adalah tipikal desa yang masih belum memiliki atau belum memaksimalkan aset desa yang mereka miliki. Temuan sementara oleh tim peneliti adalah bahwa pemberdayaan masyarakat desa tertinggal sangat ditopang oleh tingkat pendidikan dan sistem lembaga kepemimpinan yang kuat.

Kata Kunci: *pemberdayaan, desa tertinggal, aset, lokal*

PENDAHULUAN

Masalah kemiskinan di Indonesia masih menjadi perhatian khusus berbagai kalangan masyarakat, utamanya juga pemerintah Republik Indonesia. Perhatian ini ditunjukkan dengan dikeluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pembangunan daerah tertinggal dan masalah kemiskinan. Kemiskinan melibatkan seluruh aspek kehidupan.

Upaya mengentaskan kemiskinan di Indonesia terutama di perdesaan telah dilakukan melalui berbagai cara. Namun pendekatan yang dilakukan pada umumnya adalah peningkatan pendapatan dengan metode-metode yang kurang bersahabat dengan unsur lokalitas masyarakat, dan kurang memperhatikan peran masyarakat sebagai subyek pembangunan. Pengentasan kemiskinan dengan upaya memberdayakan masyarakat setempat diharapkan mampu menekan kemiskinan di perdesaan. Lebih daripada itu, masyarakat desa sebenarnya memiliki posisi penting dalam keluarga, yakni sebagai tulang punggung ekonomi keluarga.

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan kenyataan di lapangan tentang kondisi sesungguhnya masyarakat di desa tertinggal, sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran tentang: (1) Peran masyarakat desa dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi akses dan kontrol masyarakat desa dalam pemanfaatan sumberdaya lokal, dan (3) Model pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.

Usaha industri rumah tangga berbasis potensi lokal di beberapa wilayah di Kabupaten Trenggalek sebenarnya merupakan usaha masyarakat khususnya kelompok-kelompok perempuan di desa yang sudah lama dilakukan, tentu dengan binaan dinas-dinas terkait. Hal ini dipandang penting khususnya keluarga tani dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga; Usaha Kecil Menengah (UKM) berbasis potensi lokal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga masyarakat di desa, terlebih bilamana ada sentuhan ilmu pengetahuan dan intervensi dari pihak luar. Disamping itu, masyarakat desa dan sekitarnya akan mampu/berdaya dalam meningkatkan usaha yang tentunya juga dibarengi dengan peningkatan penghasilan. Maka perlu digali potensi lain yang sangat dimungkinkan dapat pula menambah penghasilan keluarga masyarakat di desa tertinggal tersebut.

Mengkaji kemiskinan tidak dapat dilepaskan dari nilai atau ketentuan yang membedakan identitas sosial laki-laki dan perempuan, serta apa yang harus dilakukan oleh keluarga masyarakat termasuk anggota keluarga/perempuan tani dan apa yang harus dilakukan oleh laki-laki dalam ekonomi, politik, sosial, dan budaya baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan bangsa (Budiman 1985; Megawangi 1997). Pemberdayaan masyarakat merupakan proses kesadaran dan pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasi yang lebih besar untuk memiliki kekuasaan dan pengawasan dalam pembuatan keputusan dan transformasi (*transformation action*) agar masyarakat desa mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat (Karl, dalam Yee-Kan 2002). Memisahkan mata rantai kemiskinan dianggap dapat membebaskan dari ketidakberdayaan dan membebaskan dari kemiskinan, menumbuhkan kekuatan, dan memiliki kemandirian. Pemberdayaan masyarakat sebagai proses terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat tersebut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Berdasarkan dari kondisi yang tersaji di atas, muncul kemudian respon dari peneliti untuk melihat lebih dalam terkait dengan pemberdayaan masyarakat desa dalam upaya menciptakan dan mengembangkan usaha industri rumah tangga berbasis potensi lokal. Oleh karena itu, fokus utama dari penelitian ini adalah model pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal di wilayah Kabupaten Trenggalek. Bertolak dari uraian yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa fenomena seperti itu merupakan dasar untuk dilakukannya penelitian ini. Dalam penelitian ini akan dikembangkan model pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal di daerah tertinggal Kabupaten Trenggalek yang akan memadukan unsur perencanaan strategis dari pemerintah dengan perencanaan partisipatori untuk mengidentifikasi permasalahan dan potensi lokal. Penelitian ini merupakan tindak lanjut dari Kajian tentang Pemetaan Inovasi Berbasis Teknologi Di Kabupaten Trenggalek Tahun 2018, dan tidak lanjut bidang strategi pengembangan penelitian yang tertuang dalam Rencana Induk Penelitian (RIP) UPN "Veteran" Jawa Timur tahun 2016-2020 utamanya pada bidang strategi pengembangan penelitian yang kelima yaitu pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat. Karena alasan inilah maka peneliti ingin mengkolaborasikan serta mensinergikan kebijakan perguruan tinggi

dengan kebijakan pemerintah daerah utamanya pada bidang pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi, jaringan kerja, dan keadilan. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Menurut Hikmat (1), pemberdayaan diartikan sebagai pemahaman secara psikologis pengaruh kontrol individu terhadap keadaan sosial, kekuatan politik, dan hak-haknya menurut undang-undang. Oleh karena itu, pemberdayaan merupakan proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya. Bahkan merupakan keharusan untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan dari hubungan eksternal.

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat. Melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka (2).

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri. Mampu menyampaikan aspirasi mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Lahirnya pemikiran pembangunan partisipasi dilatarbelakangi oleh program, proyek, dan kegiatan pembangunan masyarakat yang datang dari atas atau dari luar komunitas. Faktanya, konsep pembangunan ini sering gagal dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal. Para praktisi pembangunan juga sering mengalami frustrasi terhadap kegagalan program tersebut. Karena itu, reorientasi terhadap strategi pembangunan masyarakat adalah keniscayaan. Kemunculannya lebih mengedepankan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi dalam pembangunan masyarakat. Untuk itu, diperlukan seperangkat teknik-teknik yang dapat menciptakan kondisi adanya keberdayaan masyarakat melalui proses pemberdayaan masyarakat secara partisipatif (1).

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan hal yang menjadi pusat perhatian dalam proses pembangunan belakangan ini diberbagai negara (3). Kemiskinan yang terus melanda dan menggerus kehidupan umat manusia akibat resesi internasional

yang terus bergulir dan proses restrukturisasi agen-agen nasional-internasional, serta negara-negara setempat menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap strategi partisipasi masyarakat sebagai sarana percepatan proses pembangunan. Karena itu perlu ditekankan peningkatan tentang pentingnya pendekatan alternatif berupa pendekatan pembangunan yang diawali oleh proses pemberdayaan masyarakat lokal (4).

Pemberdayaan dan partisipasi merupakan strategi yang sangat potensial dalam rangka meningkatkan ekonomi, sosial, dan transformasi budaya. Proses ini pada akhirnya, akan dapat menciptakan pembangunan yang lebih berpusat pada rakyat. Salah satu agen internasional, Bank Dunia misalnya, percaya bahwa partisipasi masyarakat di negara dunia ketiga merupakan sarana efektif untuk menjangkau masyarakat termiskin melalui upaya pembangkitan semangat hidup untuk dapat menolong diri sendiri (1).

Dalam hal ini cara terbaik untuk mengatasi masalah pembangunan adalah membiarkan semangat wiraswasta tumbuh dalam kehidupan masyarakat, berani mengambil resiko, berani bersaing, menumbuhkan semangat untuk bersaing, dan menemukan hal-hal baru (inovasi) melalui partisipasi masyarakat. Strategi pembangunan meletakkan partisipasi masyarakat sebagai fokus isu sentral pembangunan saat ini. Partisipasi masyarakat di negara-negara dunia ketiga merupakan strategi efektif untuk mengatasi masalah urbanisasi dan industrialisasi (4). Sementara itu, strategi pemberdayaan meletakkan partisipasi aktif masyarakat ke dalam efektivitas, efisiensi, dan sikap kemandirian. Secara khusus, pemberdayaan dilaksanakan melalui kegiatan kerja sama dengan para sukarelawan, bukan bersumber dari pemerintah, tetapi dari LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), termasuk organisasi dan pergerakan masyarakat (1).

Bertambahnya jumlah keluarga tentu saja akan menambah jumlah kebutuhan dalam memenuhi keperluan anggota keluarga itu sendiri semakin meningkat. Kebutuhan keluarga ini akan terasa ringan jika ada usaha yang mendatangkan income atau penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Industri rumah tangga yang pada umumnya berawal dari usaha keluarga yang turun menurun pada akhirnya meluas dan secara otomatis dapat bermanfaat menjadi mata pencaharian penduduk kampung disekitarnya. Kegiatan ekonomi ini biasanya tidak begitu menyita waktu sehingga memungkinkan pelaku usaha dapat membagi waktunya untuk keluarga dan pekerjaan tetap yang diembannya.

Usaha mikro juga sering diidentikkan dengan industri rumah tangga karena sebagian besar kegiatan dilakukan dirumah, menggunakan teknologi sederhana atau tradisional, memperkerjakan anggota keluarga juga warga sekitar dan biasanya berorientasi pada pasar lokal. Kegiatan usaha seperti ini banyak terdapat di negara-negara berkembang dan berperan cukup besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan pengentasan kemiskinan. Meskipun pada awalnya berorientasi pada usaha lokal, tidak jarang usaha industri rumah tangga pada akhirnya mengepakkan sayap hingga keluar kota atau bahkan kemancanegara.

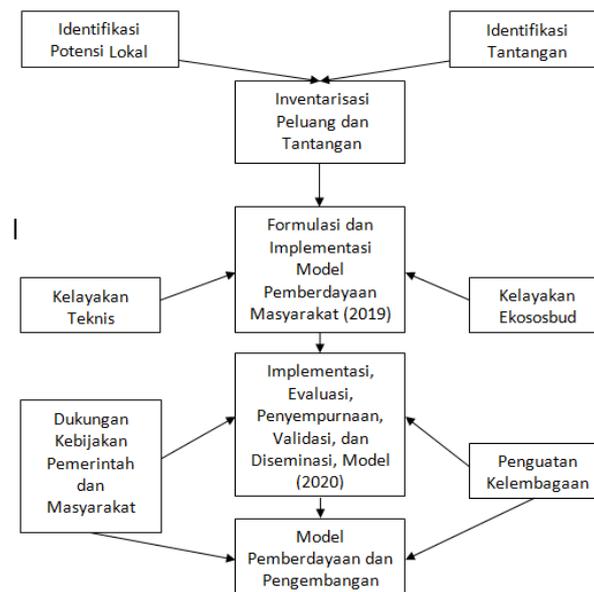
Kelompok wanita tani atau disingkat dengan KWT merupakan kumpulan para wanita tani yang berada di satu desa. Biasanya kelompok wanita tani ini berisikan istri-istri dari petani yang ingin mempunyai kegiatan lain selain bertani. Kegiatan wanita tani atau KWT ini berupa pemberdayaan wanita tani dilingkungannya bisa berupa olahan hasil pertanian yakni seperti olahan masakan atau kerajinan, bisa juga dari segi administrasi dari pertanian itu sendiri. Kelompok wanita tani atau KWT sekarang ini

mempunyai program berupa KRPL atau singkatan dari kawasan rumah pangan lestari, KRPL ini secara penuh dikelola oleh kelompok wanita tani yang didalamnya meliputi pengelolaan administrasi, pengelolaan rumah bibit atau pengelolaan tanaman yang bisa membantu dalam sektor ekonomi anggota (5).

Untuk kegiatan pengolahan hasil pertanian, kelompok wanita tani mengutamakan hasil lokalita daerah tersebut, misalkan disuatu daerah mempunyai potensi buah pisang, maka kelompok wanita tani melakukan pengolahan dari bahan dasar buah pisang contohnya seperti kripik atau selai pisang. Tidak cuma bergerak dalam olahan saja, melainkan kelompok wanita tani mencoba melangkah lebih maju dengan membuat kemasan-kemasan yang menarik untuk di pasarkan, tentunya dengan perijinan dari pemerintah berupa ijin PIRT atau pangan industri rumah tangga dan perijinan SIUP atau Surat izin usaha perdagangan. Dengan pemberdayaan kelompok wanita tani atau KWT ini diharapkan para wanita tani bisa menambah wawasan dan tentunya membantu kesejahteraan keluarga tani disekitar daerah tersebut.

Kelompok Wanita Tani (KWT) dibentuk sebagai upaya pelibatan kaum perempuan secara langsung dalam usaha-usaha peningkatan hasil pertanian, seperti menjadi bagian dari motivator dalam adopsi dan pengenalan teknologi tani. Peran ganda wanita tani ini sangat strategis dalam peningkatan produktivitas usaha tani dan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan dan ketahanan pangan menuju kesejahteraan rumah tangga petani di pedesaan. Sebagaimana beberapa hasil penelitian yang menyimpulkan beberapa hal, yaitu wanita tani berpeluang dan mampu berperan sebagai mitra kerja penyuluh dalam proses alih teknologi pertanian di pedesaan. Meningkatnya peran dan produktivas wanita tani sebagai pengurus rumah tangga dan tenaga kerja pencari nafkah (tambahan maupun utama), juga berhubungan erat dengan perannya sebagai pelaku usaha dalam upaya peningkatan pendapatan dan pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, menuju pencapaian ketahanan pangan dan kesejahteraan rumah tangga.

Perlu strategi perlindungan terhadap tenaga kerja wanita, meningkatkan efektivitas penyuluhan dan pelatihan, perbaikan regulasi, fasilitas, upah, dan kesempatan kerja agar berimbang antarjender, sebagai insentif dan keberpihakan terhadap wanita tani di pedesaan. Perlu kaji tindak dan revitalisasi mekanisme kerja penyuluhan untuk lebih melibatkan wanita tani dalam mempercepat adopsi teknologi.



Penelitian ini menggunakan pendekatan kombinasi, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif (6). Ada 4 (empat) tahapan pokok dalam penelitian ini, yaitu: (1) Tahap pendahuluan (*exploration study*) melalui studi kepustakaan dan studi lapangan untuk mengetahui kondisi dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat khususnya perempuan tani berbasis potensi lokal (7); (2) Tahap formulasi model pemberdayaan dan pengembangan; (3) Tahap implementasi model pemberdayaan dan pengembangan yang dilakukan untuk menguji efektifitas model; (4) Tahap implementasi, evaluasi, penyempurnaan, dan validasi model serta diseminasi model tersebut sehingga dapat dijadikan sebagai *blueprint* model pemberdayaan perempuan tani berbasis potensi lokal khususnya di wilayah desa-desa baik di desa-desa di wilayah Jawa Timur maupun di wilayah desa-desa lainnya di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim peneliti melakukan penerjunan lapangan (wawancara, obeservasi, dan penyebaran kuisisioner) ke tiga desa tertinggal di Kabupaten Trenggalek, yakni Desa Tasikmadu, Desa Tegaren, dan Desa Winong. Desa Tasikmadu terletak di pesisir selatan Kabupaten Trenggalek sedangkan Desa Tegaren dan Desa Winong terletak di sebelah utara Kabupaten Trenggalek dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Ponorogo. Ketiganya memiliki skor IDM (Indeks Desa Membangun) yang rendah dengan status desa berkembang. Namun, jika diteliti lebih jauh, masing-masing desa tersebut tidak memiliki aset desa. Sehingga ketergantungan terhadap Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sangatlah tinggi.

Selain ketergantungan terhadap DD dan ADD yang sangat tinggi, permasalahan lainnya adalah pemanfaatan DD tidak selaras dengan permasalahan yang ada. Desa Tegaren misalnya, desa ini memiliki permasalahan utama kapasitas sumber daya manusia yang terbatas. Namun, pemerintahan desa mengambil kebijakan yang tidak mengatasi permasalahan tersebut. Kebijakan itu adalah menggelontorkan hampir dari 90% DD untuk pembangunan infrastruktur berupa rabat jalan, pembuatan saluran irigasi, dan perawatan jalan utama. Desa Winong dan Desa Tasikmadu memiliki permasalahan yang sama. Namun, Winong dan Tasikmadu mengambil kebijakan untuk memperbanyak pemanfaatan DD juga untuk pemberdayaan dan pembinaan.

Pada Desa Tasikmadu ditemukan kesulitan masyarakat lokal untuk membina lingkungan wisata dan pengolahan lanjutan berbahan dasar ikan. Permasalahan ini sebenarnya sudah menjadi permasalahan lama. Sehingga di Desa Tasikmadu, komoditas utama masih ikan bakar. Sedangkan di Desa Winong, desa ini berstatus berkembang namun tidak menunjukkan adanya perkembangan signifikan yang sifatnya dari masyarakat lokal. Desa Winong memiliki potensi lele dan tanaman agraria, namun komoditas-komoditas tersebut masih berupa potensi, belum menjadi aset. Oleh karena itu, selain ketergantungan pada DD dan ADD dan aset yang minim, ketiga desa tersebut memiliki permasalahan akan inovasi. Inovasi ini sama sekali tidak bergerak karena di ketiga desa tersebut para *local champions* tidak diberi kesempatan untuk mengembangkan desanya.

Tercatat hanya Desa Tasikmadu dengan kepala desa yang baru ini bisa hadir sebagai kelembagaan yang kuat dan menjanjikan penuh inovasi. Sedangkan Desa Tegaren dan Winong masih belum bisa memberikan dampak signifikan baik terhadap tumbuhnya inovasi maupun keberlanjutan inovasi tersebut. Desa Tasikmadu memang memiliki karakter yang berbeda dengan Winong dan Tegaren. Tasikmadu yang

terletak di daerah pesisir terbantu dengan kultur orang pesisir yang pekerja keras. Sedangkan Winong dan Tegaren masih mengalami hambatan dalam budaya, yakni budaya pemukiman gunung yang secara sifat lebih pendiam dan kurang bergairah untuk berinovasi.

Penelitian ini sementara menghasilkan beberapa indikator yang diperlukan sebuah desa tertinggal untuk berinovasi dan maju. Indikator-indikator tersebut antara lain, kepemimpinan kepala daerah yang kuat dan inovatif, budaya masyarakat lokal yang terbuka dan berjiwa wirausaha, serta kepemilikan aset oleh desa tertinggal. Tiga indikator tersebut pada nantinya akan dikembangkan lebih lanjut, sehingga pemberdayaan masyarakat di desa tertinggal nantinya akan bertumpu pada tiga aspek besar, yakni 1) kepemimpinan, 2) kebudayaan, dan 3) kewirausahaan.

KESIMPULAN

Dengan mendasarkan pada hasil penelitian sementara, maka didapat beberapa poin kesimpulan penelitian. Poin pertama adalah permasalahan desa tertinggal di Kabupaten Trenggalek merupakan permasalahan yang berasal dari dalam (endogen). Artinya, desa tertinggal di Kabupaten Trenggalek merupakan daerah-daerah administratif yang gagal bersaing dengan kemajuan daerah lain dan tingginya mobilitas manusia. Akibatnya, masyarakat desa terlalu bergantung pada bantuan pemerintah baik dalam bentuk DD ataupun dalam bentuk ADD. Ketergantungan ini nantinya bisa berdampak negatif jika masyarakat lokal tidak ada usaha untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada.

Permasalahan selanjutnya adalah *mindset* bahwa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada adalah mengubah hampir seluruh sistem sosial dan budaya yang ada di desa. Pola pikir seperti ini yang seringkali dibawa oleh pihak-pihak yang ingin mengembangkan daerah, tapi dengan pola pikir pembangunan yang memaksa masyarakat desa tertinggal untuk mengikuti (bukan menyesuaikan) pola kehidupan perkotaan. Dana DD ataupun ADD kemudian digunakan untuk mengikuti pembangunan seperti layaknya perkotaan. Oleh karena itu, banyak langkah-langkah pembangunan yang gagal berkelanjutan karena tidak sesuai dengan sistem sosial budaya masyarakat lokal.

Oleh karena itu, dengan menopangkan pembangunan pada kepemimpinan, kebudayaan, dan kewirausahaan, diharapkan penelitian ini mampu membuat model pemberdayaan masyarakat desa tertinggal tanpa mengubah sistem sosial budaya masyarakat desa tersebut. Adapun saran dari penelitian ini untuk para pemangku kepentingan adalah 1) pemberdayaan harus mencerminkan budaya dan aset lokal masyarakat desa tertinggal dan 2) pemberdayaan harus memanfaatkan seluruh sendi dan elemen lokal dari desa tertinggal. Dengan berfokus pada lokalitas, maka pemberdayaan mungkin akan berlangsung lama, tapi dampaknya akan sesuai dengan postur masyarakat desa tertinggal di Kabupaten Trenggalek

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Hikmat, 2006, Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press.
- [2]. Suharto, E., 2005, Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: PT. Rafika Aditama
- [3]. Nayak, Purusottam, 2008. Human Development: Concept and Measurement

- [4]. Craig, G. dan Mayo M, 1995, *Community Empowerment: A Raider in Participation and Development*. London: Zed Book, h: 1-11.
- [5]. Susanti, Emy dan Mas'udah, Siti, 2017, "Women's empowerment model in home-based industries in East Java Province, Indonesia", dalam *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. 30. 353. 10.20473/mkp.V30I42017.353-366.
- [6]. Creswell, John W, 2007, *An Introduction to Mixed Methods Research*. University of Nebraska-Lincoln, (daring), Tersedia di: <https://sbsrc.unl.edu/Introduction%20to%20Mixed%20Methods.pdf>. Diakses pada 17 Agustus 2019
- [7]. Reiter, Bernd. 2017. "Theory and Methodology of Exploratory Social Science Research", dalam *Government and International Affairs Faculty Publications*. 132.